

**DAMPAK DESENTRALISASI FISKAL
TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN
ANTAR WILAYAH
(STUDI KASUS KABUPATEN/KOTA PROPINSI
SUMATERA UTARA)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro

Disusun Oleh :

Y. SIMONSEN SIANTURI
NIM. C2B709001

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2011**

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Y. Simonsen Sianturi, menyatakan bahwa skripsi dengan judul Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Wilayah (Studi Kasus Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Utara), adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 17 April 2011
Yang membuat pernyataan

Y. Simonsen Sianturi
NIM : C2B709001

ABSTRACT

Fiscal decentralization gives more advantages for regions to manage their own fiscal capacities. Regions governments have opportunity to increase economic efficiency because governments have informational advantages concerning resource allocation. The governments are in better position to provide the kind of public goods and services that closely meets the local needs.

This research aims to analyze the impact of the implementation of fiscal decentralization on regional economic growth and regional disparities in 19 regencies/cities in North Sumatera Province for a five-year implementation period, since 2004-2008. Variables studied its influence on regional economic growth is the degree of fiscal decentralization, tax ratio district, the total work force, and agglomeration level of 19 regencies/cities in North Sumatera Province. While for regions disparity the variables are examined degree of fiscal decentralization, tax ratio district, the total work force, and agglomeration level and economic growth rate of 19 regencies/cities in North Sumatera Province, using the simultaneous recursive model.

The analysis concluded that fiscal decentralization is positive effect and statistically significant amount of 365.1798 to regional economic growth in 19 regencies/cities in North Sumatera Province. Meanwhile for regions disparity, fiscal decentralization is negative effect and statistically significant amount of 284.3040 to disparities between regency/cities in North Sumatera Province. During five years of implementation of the fiscal decentralization in North Sumatera Province could be proved that the empirical, fiscal decentralization make the economic growth of 19 regencies/cities in North Sumatera Province, increased every year, but the graphics improved of economic growth every year thus increasing regional disparities occur between regencies/cities in North Sumatera Province.

Keywords : Fiscal decentralization, Regional Economic Growth, Regional Disparities

ABSTRAK

Desentralisasi fiskal memberikan banyak keuntungan bagi daerah untuk mengatur sendiri kapasitas fiskalnya. Pemerintah daerah mempunyai kesempatan untuk meningkatkan perekonomiannya secara efisien karena pemerintah telah memberikan pengetahuan bermanfaat dalam pengalokasian sumber daya yang ada. Pemerintah dapat dengan baik memberikan barang publik dan pelayanan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pelaksanaan desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan ketimpangan wilayah pada 19 kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Utara selama lima tahun periode pelaksanaan, yaitu dari tahun 2004-2008. Variabel yang diteliti pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah adalah derajat desentralisasi fiskal, rasio pajak daerah, jumlah tenaga kerja, dan tingkat aglomerasi dari 19 kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Utara. Sementara untuk ketimpangan wilayah variabel yang diteliti adalah derajat desentralisasi fiskal, rasio pajak daerah, jumlah tenaga kerja, dan tingkat aglomerasi, serta tingkat pertumbuhan ekonomi dari 19 kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Utara, dengan menggunakan persamaan model simultan berulang (*recursive model*).

Hasil analisis menyimpulkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan secara statistik sebesar 365.1798 terhadap pertumbuhan ekonomi daerah pada 19 kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Utara. Sementara itu untuk ketimpangan wilayah, desentralisasi fiskal berpengaruh negatif dan signifikan secara statistik sebesar 284.3040 ketimpangan wilayah antar kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Utara. Selama 5 tahun pelaksanaan desentralisasi fiskal di Propinsi Sumatera Utara secara empirik dapat dibuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi dari 19 kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Utara meningkat tiap tahunnya, tetapi grafik pertumbuhan ekonomi meningkat tiap tahunnya justru meningkatkan ketimpangan wilayah yang terjadi antar kabupaten/kota di propinsi Sumatera Utara.

Kata Kunci: Desentralisasi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Ketimpangan Wilayah

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Aku menjawab: Jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah " (1 Korintus 10:31)

"Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekat-Mu. Tetapi aku tetap di dekat-Mu, Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihat-Mu Engkau menuntun aku, dan kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan" (Mazmur 73:21-24)

"Sebelum engkau melangkah dan berbuat, selalu dahului dengan doa."

Terimakasihku untukmu :

Juhan Yesus Kristus Penyelamat dan Jering Dunia

Gerejaku

Bapak dan Mamak Jercinta, kasihmu sepanjang masa

Adik-adikku kekasih hatiku, kalian penyemangat dan bahagiaku

My Dina, Haholonganku, Kasih Sayangmu, Semangatmu

menguatkanku

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas bimbingan dan penyertaan-Nya yang setia sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **”DAMPAK DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP KETIPANGAN PENDAPATAN ANTAR WILAYAH (STUDI KASUS KABUPATEN/KOTA PROPINSI SUMATERA UTARA)”**, yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.

Pencapaian ini melewati sebuah proses yang banyak melibatkan dukungan dari banyak pihak, oleh karena itu secara khusus penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. M. Nasir, M.si, Akt, Ph.D, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
2. Bapak Prof. Dr. H. Miyasto, SU, Selaku Dosen Pembimbing yang telah mengajarkan penulis dengan sangat sabar dan telaten, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Maruto Umar Basuki, SE,MSi, Selaku Dosen Wali, yang telah mengarahkan penulis selama masa menempuh studi di Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro.
4. Para dosen yang telah memberikan ilmunya selama penulis menempuh pendidikan di Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro.

5. Bapak dan mamak, yang selalu mendoakan, mengarahkan dan membimbing saya. Buat bapak, terimakasih untuk pengorbanan dan kasih sayangmu kepadaku, walaupun saya belum sempat memberikan yang terbaik buat bapak. Semoga bapak tenang di samping-Nya. Untuk mamak, yang selalu sabar dan tidak pernah lelah berjuang demi kami anak-anakmu. Terimakasih untuk semua kasih sayang dan pengorbanan yang tidak ternilai harganya. Semoga mamak panjang umur, sehat dan diberikan berkat yang indah oleh-Nya.
6. Adik-adikku (Agus, Aspri, Astri Ivo), yang selalu mendukung dan mendoakanku disaat saya jatuh sampai bisa bangkit kembali. Sukses buat kalian semua adik-adikku terkasih.
7. Buat Dina Meria Sinaga, ciptaan-Nya yang indah, terimakasih buat semua yang kau berikan kepadaku, baik disaat suka maupun duka. Kasih dan sayangmu memberikanku kekuatan, kesabaranmu sangat berarti bagiku.
8. Buat kostan Derajat Celcius(Bang Taro, Tian Tompul,Marco, Berthon, Ruben, Johanes, Andi Jabat, lae Boris), terimakasih buat dukungan, kebersamaan dan semangat dari kalian. Semoga sukses dan tetap kompak.
9. Buat Tito Siagian, terimakasih bantuannya(laptop), semangat dan sarannya anggia, cepat dapat kerja dan sukses, buat Lamhot Hutabarat yang selalu memperhatikan dan menyemangatiku.
10. Buat teman-teman saya seperjuangan saya yang menjadi teman saya dalam berjuang menempuh studi dan pengalaman selama saya menempuh pendidikan di Semarang, Arnold “birong” Pangaribuan, Roy Siagian, Rudi

Silalahi, Ridho Purba, Roni Altur, Handrian, Justian Siahaan, Sihar Sirait, Bona Tambunan, Jason Sihombing, Sony Hutajulu, Abidan Saragih, Untung, Mosenk, Atur, Martha Tompul, Tita Siahaan, Lasma Munthe, Ruth Mangunsong dan yang lainnya. Terimakasih untuk pertemanannya, sukses buat kalian.

11. Buat sahabat-sahabatku di SMU, Hendra Butar-butar, Irwan Lubis, Jonathan Siahaan, Indra Pasaribu, Welly Hutagaol. Saya menyusul kalian teman-teman.
12. Buat abang-abangku di Semarang, bang Cipto Djuntak, bang Roy Lb.Gaol, bang Demson, bang Rony, bang Naldo, bang Novel, bang Arga, bang Arrow, bang Kenneth, bang John, dan buat kakak-kakakku, kak Desi, kan Ani, kak Riri, kak Medina, kak Yanti. Terimakasih yang bang, kak buat pengalaman dan nasehat dari kalian semua..
13. Buat adek-adekku di Semarang, Suryanto, Binsar, Tuken, Fendro, Sopar, Jackson, Alex Tambunan, Jerry, Nando, Riduan, Charlie, Rodo, Shela, Andriati, Harry, Otong, Gunawan, Marfin, Martha, Wisdomi, Dirman, Niko, Herwin, Moreys, Devi Nainggolan, Rosma, Andriati dan yang belum sempat saya sebutkan namanya. Terimakasih untuk pertemanan dan perhatian kalian.
14. Teman-teman PMK, terima kasih teman-teman karena udah jadi teman dalam pelayanan dan pengalaman yang menumbuhkan iman.
15. Teman-teman IESP 2002, terimakasih atas kerjasama dan pengalaman-pengalaman selama di Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro

16. Dan buat pihak-pihak lain yang mendukung saya dalam mengerjakan skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu dalam skripsi ini, terima kasih.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Pernyataan Orisinalitas Skripsi	ii
<i>Abstract</i>	iii
Abstraksi	iv
Motto dan Persembahan.....	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel	xiv
Daftar Gambar.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
1.3.1 Tujuan Penelitian	12
1.3.2 Kegunaan Peneltian.....	12
1.4 Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	
2.1 Landasan Teori.....	16
2.1.1 Pengertian dan Konsep Desentralisasi Fiskal	16
2.1.2 Pengertian dan Konsep Ketimpangan	20

2.1.3 Pengukuran Ketimpangan	23
2.1.4 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.....	28
2.1.5 Produk Domestik Regional Bruto	35
2.1.6 Teori Pertumbuhan Ekonomi.....	39
2.2 Kerangka Pemikiran Teoritis	40
2.3 Hipotesis.....	45
BAB III METODE PENELITIAN.....	46
3.1 Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional	46
3.1.1 Variabel Penelitian	46
3.1.2 Defenisi Operasional.....	46
3.2 Jenis dan Sumber Data	49
3.3 Metode Pengumpulan Data	50
3.4 Metode Analisis.....	50
3.4.1 Estimasi Model Regresi	51
3.4.2 Uji Penyimpangan Asumsi Klasik	52
3.4.2.1 Uji Normalitas	53
3.4.2.2 Uji Multikolinearitas	55
3.4.2.3 Uji Autokorelasi.....	55
3.4.2.4 Uji Heteroskedastisitas.....	56
3.4.3 Uji Statistik Analisis Regresi	57
3.4.3.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	57
3.4.3.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji-f)	58

	3.4.3.3 Uji Signifikansi Individual (Uji-t).....	58
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	60
	4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	60
	4.1.1 Propinsi Sumatera Utara	60
	4.1.2 Pertumbuhan Ekonomi 19 Kab/kota Sumatera Utara ...	61
	4.1.3 Desentralisasi Fiskal di Propinsi Sumatera Utara	63
	4.1.4 Pajak Daerah di Propinsi Sumatera Utara.....	65
	4.1.5 Tenaga Kerja di Propinsi Sumatera Utara.....	67
	4.1.6 Aglomerasi di Propinsi Sumatera Utara.....	69
	4.1.7 Ketimpangan Wilayah di Propinsi Sumatera Utara	71
	4.2 Analisis Data	73
	4.2.1 Desentralisasi Fiskal - Pertumbuhan Ekonomi	74
	4.2.1.1 Pengujian Kelayakan Analisis Regresi	74
	4.2.1.1.1 Uji Normalitas Data.....	74
	4.2.1.1.2 Uji Multikolinearitas.....	75
	4.2.1.1.3 Uji Autokorelasi	76
	4.2.1.1.4 Uji Heteroskedastisitas	77
	4.2.1.2 Hasil Analisis Regresi.....	79
	4.2.1.2.1 Estimasi Model Regresi.....	79
	4.2.1.2.2 Koefisien Detrerminasi (R^2)	
	4.2.1.2.3 Uji F	80
	4.2.1.2.4 Uji t.....	81
	4.2.1.3 Interpretasi Hasil.....	82

4.2.2 Desentralisasi Fiskal Terhadap Ketimpangan Wilayah	89
4.2.2.1 Pengujian Kelayakan Analisis Regresi	89
4.2.2.1.1 Uji Normalitas Data	89
4.2.2.1.2 Uji Multikolinearitas.....	90
4.2.2.1.3 Uji Autokorelasi	91
4.2.2.1.4 Uji Heteroskedastisitas	92
4.2.2.2 Hasil Analisis Regresi.....	93
4.2.2.2.1 Estimasi Model Regresi.....	93
4.2.2.2.2 Koefisien Detreminasi (R^2)	94
4.2.2.2.3 Uji F.....	94
4.2.2.2.4 Uji t.....	95
4.2.2.3 Interpretasi Hasil.....	96
BAB V PENUTUP	104
5.1 Kesimpulan.....	104
5.2 Saran	106
Daftar Pustaka.....	107
Daftar Lampiran.....	109

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Pengambilan Keputusan Ada Tidaknya Autokorelasi	56
Tabel 4.1 Pertumbuhan Ekonomi 19 Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Utara Tahun 2004-2008	61
Tabel 4.2 Derajat Desentralisasi Fiskal 19 Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Utara Tahun 2004-2008	64
Tabel 4.3 Rasio Pajak Daerah 19 Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Utara Tahun 2004-2008	66
Tabel 4.4 Jumlah Tenaga Kerja 19 Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Utara Tahun 2004-2008	68
Tabel 4.5 Tingkat Aglomerasi 19 Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Utara Tahun 2004-2008	70
Tabel 4.6 Tingkat Ketimpangan Antar Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Utara Tahun 2004-2008	72
Tabel 4.7 Estimasi Model <i>Panel Least Square (Cross-Section Weights and White Cross-Section)</i>	73
Tabel 4.8 Hasil Uji Jarque-Bera (J-B test) Persamaan PE	74
Tabel 4.9 Hasil Koefisien Determinasi (R^2) Parsial Persamaan PE.....	75
Tabel 4.10 Hasil Uji Durbin-Watson (D-W test) Persamaan PE	76
Tabel 4.11 Hasil Uji Park Persamaan PE	78

Tabel 4.12 Hasil Uji Signifikansi Simultan (f-test, dengan $\alpha = 0,05$)	
Persamaan PE	81
Tabel 4.13 Hasil Uji Signifikansi Simultan (f-test, dengan Prob = 0,000)	
Persamaan PE.....	81
Tabel 4.14 Hasil Uji Signifikansi Individual (t-test) Persamaan PE.....	82
Tabel 4.15 Hasil Uji Jarque-Bera (J-B test) Persamaan KW	90
Tabel 4.16 Hasil Koefisien Determinasi (R^2) Parsial Persamaan KW	90
Tabel 4.17 Hasil Uji Durbin-Watson (D-W test) Persamaan KW	91
Tabel 4.18 Hasil Uji Park Persamaan KW	92
Tabel 4.19 Hasil Uji Signifikansi Simultan (f-test, dengan $\alpha = 0,05$)	
Persamaan KW	95
Tabel 4.20 Hasil Uji Signifikansi Simultan (f-test, Prob = 0,000)	
Persamaan KW	95
Tabel 4.21 Hasil Uji Signifikansi Individual (t-test) Persamaan KW.....	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kurva Lorentz.....	24
Gambar 2.2	Bagan Kerangka Pemikiran Teoritis	44

BAB I

PENDAHULUAN

I. 1 Latar Belakang Masalah

Sebagai suatu negara dengan ribuan pulau, perbedaan karakteristik wilayah adalah konsekuensi logis yang tidak dapat dihindari Indonesia. Karakteristik wilayah mempunyai pengaruh kuat pada terciptanya pola pembangunan ekonomi, sehingga pola pembangunan ekonomi di Indonesia juga tidak seragam. Ketidakteragaman ini berpengaruh pada kemampuan untuk tumbuh, yang mengakibatkan beberapa wilayah mampu tumbuh dengan cepat sementara wilayah lainnya tumbuh lambat. Kemampuan tumbuh yang berbeda ini pada akhirnya menyebabkan terjadinya ketimpangan baik pembangunan maupun hasilnya, yakni pendapatan antar daerah.

Pada hakekatnya, kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok berpendapatan rendah serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan (*poverty line*) merupakan dua masalah besar di banyak negara-negara sedang berkembang (NSB), tidak terkecuali di Indonesia.¹ Karenanya, tidaklah mengherankan ketimpangan itu pastinya selalu ada, baik itu di negara miskin, negara sedang berkembang, bahkan negara maju sekalipun. Hanya saja yang membedakan dari semua itu adalah seberapa besar tingkat ketimpangan yang terjadi pada masing-masing negara tersebut.

¹ Tulus T.H. Tambunan. 2003. *Perekonomian Indonesia: Beberapa Permasalahan Penting*. Ghalia Indonesia, Jakarta. Hal 82.

Meskipun ketimpangan itu sendiri adalah suatu yang selalu ada dalam proses pembangunan, khususnya pada tahap-tahap awal pembangunan, namun ketimpangan yang semakin melebar harus dihindari. Ketimpangan yang semakin lebar akan melahirkan berbagai ketidakpuasan, yang jika terus terakumulasi dapat menimbulkan keresahan yang berujung pada berbagai macam konflik. Konflik itu bisa terjadi antar masyarakat, antar daerah, atau masyarakat dengan pemerintah maupun antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Pada masa pemerintahan Orde Baru, proses pembangunan dilaksanakan secara sentralistis. Pemerintah pusat menempatkan dirinya sebagai penggerak utama dalam upaya akselerasi pembangunan diseluruh pelosok tanah air. Berbagai kebijakan pembangunan diputuskan secara terpusat dengan instrumen utamanya Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Sentralisasi berbagai keputusan pada pemerintah pusat semakin memperbesar inefisiensi, karena banyak proyek-proyek yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh daerah.

Studi yang dilakukan Kenneth Davey (1989) terhadap pemerintahan Indonesia menunjukkan bahwa terdapat tiga faktor yang menyebabkan kenapa pemerintah Indonesia cenderung bersifat sentralistik dalam menjalankan proses pembangunannya.² Pertama, kekhawatiran mengenai persatuan nasional dan kekhawatiran mengenai kekuatan-kekuatan memecah yang mau tidak mau muncul dari keadaan yang kurang stabil di awal kemerdekaan. Kedua, masalah memelihara keseimbangan politik dan keadilan

² Kenneth Davey. 1989. *Hubungan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, dalam Nick Devas (Ed), *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. UI-Press, Jakarta. Hal. 181

dalam pembagian sumberdaya antar daerah. Ketiga, pemerintah pusat ingin memegang kendali yang erat atas kebijaksanaan pembangunan ekonomi.

Sejak runtuhnya masa orde baru, semangat untuk otonomi daerah dan desentralisasi kembali menguat, terlebih untuk daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alamnya. Hal ini banyak dilakukan dengan tuntutan untuk lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti yang dilakukan oleh Timor-Timur, Aceh dan Papua.

Untuk menjaga integrasi nasional terhadap kondisi ini serta menjawab atas tuntutan masyarakat daerah, maka pada masa pemerintahan Habibie dikeluarkanlah satu paket kebijakan tentang Otonomi Daerah berupa UU. No. 22/1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah. Pelaksanaan kedua Undang-undang tersebut secara resmi dimulai pada tanggal 1 Januari 2001. Kedua undang-undang ini kemudian diamandemen menjadi UU No. 32 dan No. 33 tahun 2004.

Hakekat otonomi adalah adanya kewenangan daerah, bukan pendelegasian (Saragih, 2003). Daerah tidak lagi sekedar menjalankan instruksi pemerintah pusat, tetapi benar-benar mempunyai keleluasaan untuk meningkatkan kreatifitas dalam mengembangkan potensi yang selama era sentralisasi bisa dikatakan terpasung (Mardiasmo, 2002). Otonomi daerah tidak hanya berhenti pada pembagian dana pembangunan yang relatif “adil” antara pemerintah pusat dan daerah yang diwujudkan dalam bentuk dana perimbangan (*balancing fund*), tetapi keberhasilan otonomi daerah juga diukur dari seberapa besar porsi sumbangan masyarakat lokal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB). Oleh sebab itu, implementasi otonomi daerah tidak hanya tanggung jawab penyelenggara pemerintah daerah, yakni Bupati atau Walikota serta perangkat daerah lainnya, tetapi juga seluruh masyarakat lokal di tiap-tiap daerah (Saragih, 2003;30).

Desentralisasi fiskal tidak akan berguna jika tidak diikuti dengan kemampuan finansial yang cukup memadai oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu melalui UU No. 33 Tahun 2004, diharapkan nantinya akan dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk pendanaan pemerintah daerah menurut UU No. 33 Tahun 2004 dalam pelaksanaan desentralisasi meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Sumber-sumber penerimaan daerah ini memberikan kewenangan bagi daerah untuk meningkatkan kemampuan pendapatannya yaitu dengan meluaskan jangkauan dari bagian pajak dan bagi hasil Sumber Daya Alam dengan pemerintah pusat.

Pendapatan Asli Daerah merupakan Pendapatan Daerah yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada Daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas Desentralisasi.

Dana Perimbangan merupakan pendanaan Daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan selain dimaksudkan untuk

membantu Daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara Pusat dan Daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar-Daerah. Ketiga komponen Dana Perimbangan ini merupakan sistem transfer dana dari Pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh.

Pinjaman Daerah merupakan salah satu sumber Pembiayaan yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pembiayaan yang bersumber dari pinjaman harus dikelola secara benar agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi Keuangan Daerah sendiri serta stabilitas ekonomi. dan moneter secara nasional. Oleh karena itu, Pinjaman Daerah perlu mengikuti kriteria, persyaratan, mekanisme, dan sanksi Pinjaman Daerah yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Tujuan utama dari desentralisasi fiskal adalah mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya, desentralisasi fiskal hanya mampu meningkatkan pertumbuhan daerah tanpa disertai dengan pemerataan pendapatan antar wilayah. Dengan kata lain, pelaksanaan desentralisasi fiskal disamping memacu pertumbuhan juga disertai dengan kesenjangan pendapatan antar wilayah.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Joko Waluyo dari Univeristas Pembangunan Nasional tentang kasus desentralisasi fiskal dan ketimpangan pendapatan antar propinsi di Indonesia, proses desentralisasi fiskal lebih terasa di wilayah Indonesia bagian timur di banding dengan wilayah Indonesia bagian barat. Dampak desentralisasi fiskal di wilayah Indonesia timur

terlihat dengan pertumbuhan daerah yang lebih besar dibanding sebelum diterapkannya desentralisasi fiskal. Sementara di wilayah Indonesia bagian barat, seperti Pulau Jawa dan Bali pertumbuhan ekonominya yang paling rendah sejak diterapkannya desentralisasi fiskal. Dana bagi hasil SDA (DBSDA) menghasilkan rata-rata pertumbuhan ekonomi yang negatif. Hanya daerah kaya SDA (Riau, dan Kaltim) yang paling menikmati pertumbuhan ekonomi positif. Di samping itu kebijakan bagi hasil SDA memperburuk kesenjangan pendapatan antardaerah. Hal ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal belum dapat mengurangi kesenjangan pendapatan antar wilayah di Indonesia.

Wilayah Propinsi Sumatera Utara sebagian besar berada di daratan Pulau Sumatera, selebihnya berada di kepulauan yang meliputi Pulau Nias, Kepulauan Batu-batu, serta pulau-pulau kecil lainnya, baik di bagian barat maupun bagian timur Pulau Sumatera. Luas wilayahnya sekitar 71,7 ribu km persegi, atau 3,7% dari luas wilayah Indonesia. Berdasarkan letak dan kondisi alamnya, Propinsi Sumatera Utara terbagi atas wilayah pantai barat, dataran tinggi, dan pantai timur. Danau Toba di Propinsi Sumatera Utara adalah danau terbesar di Indonesia yang menjadi objek wisata andalan di Propinsi Sumatera Utara.

Pada tahun 1999, jumlah penduduk di Propinsi Sumatera Utara diperkirakan 11,9 juta jiwa. Jumlah ini menempatkan daerah ini sebagai propinsi keempat dengan penduduk terbanyak di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Kepadatan penduduknya rata-rata 167 jiwa/km persegi.

Secara administratif, Propinsi Sumatera Utara terdiri dari 13 kabupaten dan 6 kota, 252 kecamatan, 4815 desa, serta 463 kelurahan. Data ini sebelum

terjadinya pemekaran wilayah di Propinsi Sumatera Utara pada tahun 2008-2009. Kabupaten Tapanuli Selatan menjadi kabupaten terluas, sebaliknya Kabupaten Karo sebagai kabupaten terkecil di Propinsi Sumatera Utara. Dilihat dari jumlah penduduknya Kabupaten Deli Serdang berpenduduk paling banyak dan terpadat dibanding dengan kabupaten lainnya.

Propinsi Sumatera Utara dikenal sebagai pusat perkebunan di Indonesia. Usaha perkebunan di propinsi ini dibuka sejak zaman penjajahan Belanda yang terkonsentrasi di wilayah perbatasan dengan Propinsi Riau, meliputi Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, dan Kabupaten Asahan. Komoditi perkebunan utama yang dihasilkan antara lain kelapa sawit, karet, kelapa, kopi, dan tembakau.

Propinsi Sumatera Utara sudah mempunyai sarana pendukung perkembangan perekonomian yang cukup memadai. Sarana jalan di Propinsi Sumatera Utara, misalnya, pada umumnya telah mencapai daerah pedesaan. Dari sekitar 23 ribu km panjang jalan wilayah ini, 90% diantaranya merupakan jalan kabupaten dan kota. Pelabuhan laut antar negara dan antar pulau antara lain tersedia di Pelabuhan Belawan, Tanjung Balai, dan Kuala Tanjung. Propinsi Sumatera Utara juga mempunyai pelabuhan udara, yaitu Bandara Polonia.

Sarana pendidikan dari tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai tingkat Sekolah Menengah Umum (SMU) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), tersedia dan tersebar sesuai dengan jumlah penduduk. Sebagai kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak, Kabupaten Deli Serdang, mempunyai fasilitas pendidikan terbanyak setelah Kota Medan. Khusus untuk fasilitas Sekolah Dasar

(SD) selama empat tahun terakhir jumlahnya menurun. Hal ini disebabkan adanya penyatuan (*regrouping*) beberapa SD, karena jumlah muridnya terus berkurang. Menurunnya jumlah murid usia SD ini agaknya merupakan indikasi dari keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) dalam menekan angka kelahiran.

Sementara itu fasilitas pendidikan tinggi umumnya terpusat di Kota Medan. Selain perguruan tinggi negeri seperti Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Negeri Medan (Unimed), dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN), di kota ini terdapat 100 perguruan tinggi swasta, atau 73% dari 137 perguruan tinggi swasta yang ada di propinsi ini. Namun demikian kualitas pendidikan tinggi itu masih diragukan dan dipertanyakan oleh beberapa kalangan, sehingga banyak orang tua lebih memilih menyekolahkan anaknya ke pulau Jawa atau bahkan ke Negara Malaysia.

Hampir semua kabupaten di Propinsi Sumatera Utara telah memiliki fasilitas Rumah Sakit Umum (RSU) milik pemerintah, kecuali di Kabupaten Tapanuli Tengah. Disebagian besar kabupaten juga ditunjang oleh Rumah Sakit Umum swasta. Demikian pula sarana kesehatan di tingkat kecamatan dan pedesaan jumlahnya cukup banyak, yaitu berupa Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan Umum, dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).

Seperti kebanyakan kasus di Indonesia, khususnya di Propinsi Sumatera Utara pelaksanaan desentralisasi fiskal telah dilaksanakan sejak tahun 2001. Meskipun menyebabkan pertumbuhan ekonomi tiap kabupaten/Kota meningkat,

namun di sisi lain ketimpangan antar Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Utara juga mengalami peningkatan dalam tujuh tahun terakhir. Hal ini dapat terlihat dari peningkatan PAD yang berbeda-beda di setiap Kabupaten/Kota. Untuk Kabupaten Karo, kebijakan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah, menyebabkan peningkatan PAD dan RAPBD yang sangat tinggi. Untuk RAPBD meningkat 66% dari tahun 2000. Sementara Kabupaten/Kota lainnya belum bisa memaksimalkan dampak otonomi daerah dan desentralisasi fiskal tersebut. Hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan peningkatan pendapatan antar wilayah di Propinsi Sumatera Utara, yang mengakibatkan adanya kesenjangan pendapatan antar wilayah. Maka untuk melihat dampak desentralisasi fiskal terhadap kesenjangan pendapatan antar Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Utara, penulis membuat skripsi dengan judul **“Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Wilayah (Studi Kasus Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Utara)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Implikasi langsung dari kewenangan/fungsi yang diserahkan kepada Daerah adalah kebutuhan dana yang cukup besar. Untuk itu, perlu diatur perimbangan keuangan (hubungan keuangan) antara Pusat dan Daerah yang dimaksudkan untuk membiayai tugas yang menjadi tanggungjawabnya.

Dengan berlakunya UU. No. 22/1999 dan UU No. 25/1999 yang mengatur kebijakan pemerintahan daerah dan desentralisasi fiskal sebagai awal dimulainya suatu era baru penyelenggaraan pemerintah daerah lebih otonom, membuka satu

harapan baru untuk memecahkan masalah ketimpangan yang terjadi selama ini. Dalam UU No.25 th 1999 telah diperhitungkan pula kemungkinan tentang kondisi tersebut yakni dengan diadakannya Dana Alokasi Umum (DAU). DAU ini memiliki ciri berupa dana blok (*block grant*) dan dialokasikan ke daerah dengan tujuan agar masyarakat di seluruh Indonesia memiliki kualitas atas pelayanan jasa dan fasilitas publik yang sama (*Equalization Principle*). Menurut ketentuan yang berlaku pada UU No.25 1999, maka alokasi DAU ini ditentukan dengan mempertimbangkan sisi kebutuhan (*Fiscal Needs*) dan sisi kemampuan fiskal (*Fiscal Capacity*).

Melihat uraian di atas juga merujuk pada latar belakang yang telah dibuat, maka perumusan masalah dari penelitian ini, yaitu:

1. Dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memiliki sumber-sumber penerimaan daerah. Dengan sumber-sumber penerimaan daerah, seharusnya daerah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Propinsi Sumatera Utara. Didasari latar belakang tersebut muncul pertanyaan penelitian yang dapat dikemukakan adalah “apakah pelaksanaan desentralisasi fiskal mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Utara?”
2. Dengan pelaksanaan desentralisasi fiskal di Propinsi Sumatera Utara, disatu sisi pertumbuhan ekonomi cukup tinggi setelah pelaksanaan desentralisasi fiskal tersebut, namun di sisi lain terjadi ketimpangan pendapatan antar wilayah Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Utara. Didasari latar belakang tersebut maka pertanyaan penelitian yang dimunculkan sehubungan dengan pokok

permasalahan tersebut adalah “apa penyebab ketimpangan pendapatan antar daerah setelah pelaksanaan desentralisasi fiskal di Sumatera Utara?”

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dampak diterapkannya kebijakan desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Utara.
2. Mengetahui dampak diterapkannya kebijakan desentralisasi fiskal terhadap tingkat ketimpangan pendapatan di wilayah kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Utara.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Propinsi Sumatera Utara dalam mengambil kebijaksanaan dalam melakukan pemerataan antar daerah dengan menggunakan instrumen kebijakan fiskal.
2. Menambah, melengkapi sekaligus sebagai pembanding hasil-hasil penelitian yang sudah ada menyangkut topic yang sama.
3. Untuk referensi dan informasi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi dengan judul “**DAMPAK DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN ANTAR WILAYAH (STUDI KASUS KABUPATEN/KOTA PROPINSI SUMATERA UTARA)**” akan dibagi dalam beberapa bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, serta tujuan dan kegunaan penelitian. Latar belakang menjelaskan informasi yang relevan untuk membantu pokok permasalahan, justifikasi penelitian, bersifat umum-khusus. Rumusan masalah menjelaskan suatu keadaan, fenomena, atau konsep yang masih memerlukan pemecahan melalui suatu penelitian. Tujuan menjelaskan tujuan umum dan tujuan khusus yang ingin dicapai sesuai dengan latar belakang, perumusan masalah dan hipotesis yang diajukan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab kedua akan diuraikan landasan teoritis menjelaskan teori-teori yang mendukung perumusan hipotesis, yang didukung dengan penelitian terdahulu. Kerangka pemikiran teoritis menjelaskan permasalahan yang akan diteliti yaitu tentang apa yang seharusnya, sehingga timbul adanya hipotesis (dugaan awal penelitian). Jadi, hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang diteliti.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ketiga dijelaskan mengenai defenisi operasional yang mendeskripsikan variabel-variabel dalam penelitian. Jenis dan sumber data mendeskripsikan tentang jenis data dari variabel-variabel dalam penelitian, baik berupa data primer maupun sekunder. Metode analisis mendeskripsikan jenis atau model analisis dan mekanisme alat analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab keempat diuraikan tentang deskripsi objek penelitian yang secara deskriptif dibahas variabel-variabel yang berkaitan dengan masalah penelitian. Analisis data dilakukan untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Setelah data dianalisis, dalam pembahasan dijelaskan implikasi dari hasil analisis data dan interpretasi yang dibuat dalam penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab kelima merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan penyajian secara singkat apa yang telah diperoleh dari pembahasan. dan saran sebagai masukan pada penelitian mendatang. Saran-saran diajukan untuk perbaikan pelaksanaan (praktek di lapangan) dan perbaikan penelitian berikutnya berdasarkan penerapan teori yang digunakan.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian dan Konsep Desentralisasi Fiskal

Pelaksanaan otonomi daerah ditandai dengan diundangkannya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian disusul dengan kebijakan desentralisasi fiskal dengan landasan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah tidak terlepas dari tuntutan reformasi yang bergulir beberapa tahun sebelumnya, dimana puncak tuntutan reformasi tersebut terjadi pada tahun 1998.

Dalam mendefinisikan desentralisasi, beberapa ahli menggunakan pandangan dan perspektifnya masing-masing. Parson (1961) dalam Hidayat (2004) mendefinisikan desentralisasi sebagai: “*sharing of the governmental power by a central ruling group with other groups, each having authority within a specific area of the state*”.³ Pada bagian lain, Smith (1985) dalam Hidayat (2004) merumuskan definisi desentralisasi berdasarkan perspektif politik, yakni: “*the transfer of power from top level to lower level, in a territorial hierarchy, which could be one of government within a state, or offices within a large organization*”.⁴ Sementara itu Hidayat (2004) sendiri menyatakan bahwa : “konsep desentralisasi lebih banyak bicara tentang mekanisme pengaturan relasi kekuasaan dan wewenang dalam struktur pemerintahan”.⁵

Lebih jauh, terkait dengan desentralisasi yang sedang dilaksanakan oleh Indonesia, Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Departemen Keuangan RI, Machfud Sidik menyatakan desentralisasi sebagai: “sebuah alat

³ Syarif Hidayat. 2004. *Desentralisasi: Tinjauan Literatur Tentang Konsep Dasar, Pengalaman Negara Lain, dan Dinamika Kebijakan di Indonesia*, dalam Hari Susanto (penyunting), Otonomi Daerah: Teori dan Kenyataan Empiris. PPE-LIPI, Jakarta. Hal. 6.

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*. Hal 1.

untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, khususnya dalam rangka memberikan pelayanan umum yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis”.⁶

Desentralisasi fiskal merupakan komponen utama dari desentralisasi. Dalam melaksanakan fungsinya secara efektif dan mendapat kebebasan dalam pengambilan keputusan pengeluaran di sektor publik, maka Pemerintah Daerah harus mendapat dukungan sumber-sumber keuangan yang memadai baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Pinjaman, maupun Sub sisi/Bantuan dari Pemerintah Pusat.

Belajar dari pengalaman internasional, pelaksanaan otonomi daerah tidak selalu harus dibiayai oleh pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri. Namun, secara pasti dapat dikatakan bahwa apabila semakin maju industri suatu negara maka pelaksanaan demokrasi akan semakin baik. Penyelenggaraan pemerintahan yang semakin demokratis akan tercermin dalam pelaksanaan otonomi daerah yang semakin besar. Pelaksanaan otonomi yang semakin besar tersebut dari aspek keuangan tercermin dari expenditure ratio yang cenderung semakin besar. Dengan demikian, keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dalam suatu negara tidak selalu harus diukur dari besarnya peranan PAD untuk membiayai seluruh aktivitas pemerintahan daerah. Boediono, sebagai menteri keuangan di tahun 2002, menyebutkan bahwa:

Kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia lebih ditekankan pada aspek pengeluaran atau belanja dengan memperbesar porsi di daerah. Hal

⁶ Machfud Sidik. 2002. *Kebijakan, Implementasi, dan Pandangan ke Depan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah*, dalam seminar nasional Menciptakan Good Governance demi Mendukung Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal. Yogyakarta. 20 April 2002. Hal. 1.

*ini memiliki berbagai alasan yang secara akademis dapat dipertanggungjawabkan, yaitu kondisi antar daerah yang sangat heterogen, antara lain dapat dilihat dari jumlah penduduk, luas wilayah, kepadatan penduduk, kondisi geografis, kondisi dan potensi perekonomian daerah.*⁷

Pelaksanaan desentralisasi fiskal akan berjalan dengan baik kalau didukung faktor-faktor berikut:⁸

- a) Pemerintah Pusat yang mampu melakukan pengawasan dan *enforcement*;
- b) SDM yang kuat pada Pemda guna menggantikan peran Pemerintah Pusat;
- c) Keseimbangan dan kejelasan dalam pembagian tanggung jawab dan kewenangan dalam melakukan pungutan pajak dan retribusi daerah.

Adapun tujuan dari kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia sesuai dengan UU Nomor 22 dan UU Nomor 25 Tahun 1999 serta UU-APBN, yaitu untuk :

1. Kestinambungan kebijaksanaan fiskal (*Fiscal Sustainability*) dalam konteks kebijaksanaan ekonomi makro.
2. Mengoreksi *vertical imbalance*, yaitu untuk memperkecil ketimpangan yang terjadi antara keuangan Pemerintah Pusat dan keuangan Daerah yang dilakukan dengan memperbesar *taxing power* Daerah.
3. Mengkoreksi *horizontal imbalance* yaitu ketimpangan antar Daerah dalam kemampuan keuangannya, dimana relatif masih sangat bervariasi

⁷ Boediono. 2002. *Kebijakan Pengelolaan Keuangan Negara dalam Rangka Pelaksanaan Azas Desentralisasi Fiskal*, disampaikan pada Rapat Koordinasi Pendayagunaan Aparatur Negara Tingkat Nasional Tahun 2002, Jakarta. 11 Februari 2002. Hal. 5.

⁸ Machfud Sidik. *Op Cit.* Hal. 5

kemampuan keuangan antar Daerah.

4. Berkurangnya tingkat ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.
5. Akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam rangka peningkatan kinerja pemerintah Daerah.
6. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
7. Adanya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di sektor publik.

2.1.2 Pengertian dan Konsep Ketimpangan

Ketimpangan merupakan suatu fenomena yang terjadi hampir di lapisan negara di dunia, baik itu negara miskin, negara sedang berkembang, maupun negara maju, hanya yang membedakan dari semuanya itu yaitu besaran tingkat ketimpangan tersebut, karenanya ketimpangan itu tidak mungkin dihilangkan namun hanya dapat ditekan hingga batas yang dapat ditoleransi.

Dalam laporan Pembangunan Dunia tahun 2006, publikasi World Bank, dinyatakan bahwa ketimpangan (baik antar wilayah maupun antar negara) merupakan hal yang penting dalam pembangunan, karena ketimpangan mempengaruhi proses pembangunan jangka panjang. Dua saluran yang digunakan ketimpangan untuk mempengaruhi pembangunan dalam jangka panjang adalah melalui pengaruh- pengaruh kesempatan yang timpang ketika kondisi pasar tidak

sempurna dan berbagai kosekuensi ketimpangan untuk kualitas institusi yang dikembangkan oleh suatu masyarakat.

Lebih lanjut, World Bank dalam laporannya tersebut menyatakan bahwa faktor- faktor geografis dan historis yang mendasari ketimpangan antar wilayah sangat kompleks dan tumpang tindih. Kemampuan mengelola sumber daya yang rendah dan jarak dari pasar yang jauh dapat menghambat proses pembangunan di kawasan-kawasan tertinggal. Dalam banyak kasus, perbedaan-perbedaan ekonomi itu disebabkan oleh relasi yang tidak setara dan sudah berlangsung lama, antara kawasan-kawasan yang maju dengan yang tertinggal, serta kelemahan institusional pada waktu sebelumnya.

Myrdal (1957) dalam Jhingan (2004) menerangkan ketimpangan antar daerah dengan membangun teori keterbelakangan dan pembangunan ekonominya disekitar ide ketimpangan regional pada taraf nasional dan internasional.⁹ Untuk menjelaskan hal itu, Myrdal menggunakan ide *spread effect* dan *backwash effect* sebagai bentuk pengaruh penjalaran dari pusat pertumbuhan ke daerah sekitar.

Spread effect didefinisikan sebagai suatu pengaruh yang menguntungkan (*favorable effect*), yang mencakup aliran kegiatan-kegiatan investasi dari pusat pertumbuhan ke wilayah sekitar. *Backwash effect* didefinisikan sebagai pengaruh yang merugikan (*infavorable effect*) yang mencakup aliran manusia dari wilayah sekitar termasuk aliran modal ke wilayah inti, sehingga mengakibatkan berkurangnya modal pembangunan bagi wilayah pinggiran yang sebenarnya diperlukan untuk dapat mengimbangi perkembangan wilayah inti. Lebih lanjut,

⁹ M.L. Jhingan. 2004. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, dalam D. Guritno (penerjemah)*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal. 211-216.

Myrdal mengemukakan ketimpangan regional terjadi akibat besarnya pengaruh *backwash effect* dibandingkan dengan *spread effect* di negara-negara terbelakang.

Perbedaan kemajuan wilayah berarti tidak samanya kemampuan untuk bertumbuh sehingga yang timbul adalah terjadinya ketidakmerataan antar daerah. Sehubungan dengan hal ini, muncul pendapat dan studi-studi empiris yang menempatkan pemerataan dan pertumbuhan pada satu posisi yang dikotonomis.

Kuznets (1957) dalam Tambunan (2003) mengemukakan suatu hipotesis yang terkenal dengan sebutan “Hipotesis U terbalik”.¹⁰ Hipotesis ini dihasilkan melalui suatu kajian empiris terhadap pola pertumbuhan sejumlah negara didunia, pada tahap awal pertumbuhan ekonomi terdapat *trade-off* antara pertumbuhan dan pemerataan. Pola ini disebabkan karena pertumbuhan pada tahap awal pembangunan cenderung dipusatkan pada sektor modern perekonomian yang pada saat itu kecil dalam penyerapan tenaga kerja. Ketimpangan membesar karena kesenjangan antar sektor modern dan tradisional meningkat. Peningkatan tersebut terjadi karena perkembangan disektor modern lebih cepat dibandingkan dengan sektor tradisional. Akan tetapi dalam jangka panjang , pada saat kondisi ekonomi mencapai tingkat kedewasaan (*maturity*) dan dengan asumsi mekanisme pasar bebas serta mobilitas semua faktor-faktor produksi antar negara tanpa sedikitpun rintangan atau distorsi, maka perbedaan dalam laju pertumbuhan *output* antar negara akan cenderung mengecil bersamaan dengan tingkat pendapatan perkapita dan laju pertumbuhan rata-rata-nya yang semakin tinggi di setiap negara, yang akhirnya menghilangkan kesenjangan.

¹⁰ Tulus T.H. Tambunan. *Op Cit.* Hal. 84-89

Salah satu kajian yang menguatkan hipotesis Kuznet tersebut dilakukan oleh Williamson (1965) dalam Tambunan (2003).¹¹ Williamson untuk pertama kalinya menyelidiki masalah ketimpangan antar daerah dengan membobot perhitungan *coeffisient of variation (CV)* dengan jumlah penduduk menurut wilayah. Dalam studinya ia menemukan bahwa dalam tahap awal pembangunan ekonomi disparitas dalam distribusi pendapatan akan membesar dan terkonsentrasi pada wilayah-wilayah tertentu yang pada awalnya sudah relatif maju, misalnya dalam pembangunan industri, infrastruktur, dan SDM. Kemudian dalam tahap pertumbuhan ekonomi yang lebih besar, terjadi konvergensi dan ketimpangan dalam distribusi pendapatan akan mengalami penurunan.

2.1.3 Pengukuran Ketimpangan

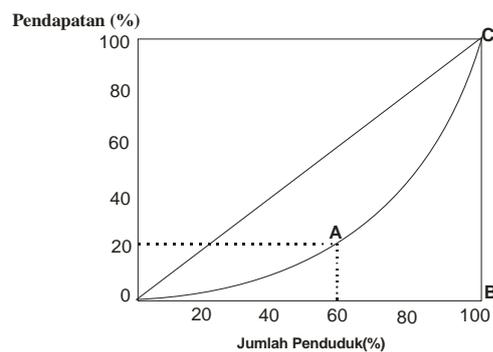
Distribusi pendapatan nasional mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu negara dikalangan penduduknya. Terdapat berbagai kriteria atau tolok ukur untuk menilai pemerataan distribusi yang dimaksud, diantaranya yaitu:

1. Kurva Lorenz

Kurva Lorenz menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan nasional di kalangan lapisan-lapisan penduduk secara kumulatif pula. Kurva ini terletak disebuah bujur sangkar yang disisi tegaknya melambangkan persentase kumulatif pendapatan nasional, sedangkan sisi dasarnya mewakili persentase kumulatif penduduk. Kurvanya sendiri ditempatkan pada diagonal

¹¹ *Ibid.* Hal. 146.

utama bujur sangkar tersebut. Kurva Lorenz yang semakin dekat ke diagonal (semakin lurus) menyiratkan distribusi pendapatan nasional yang semakin merata. Sebaliknya, jika kurva Lorenz semakin jauh dari diagonal (semakin lengkung), maka ia mencerminkan keadaan yang semakin buruk, distribusi pendapatan nasional semakin timpang atau tidak merata.



Sumber: Dumairy (1996)

Gambar 2.1 Kurva Lorenz

Keterangan: titik A mencerminkan 60% penduduk berpendapatan terendah menghasilkan atau hanya memiliki 20% pendapatan nasional.

2. Indeks Gini

Gini atau lengkapnya Corrado Gini merumuskan suatu ukuran untuk menghitung tingkat ketimpangan pendapatan personal secara agregatif yang diterima diatas tingkat tertentu. Hasil temuannya sering disebut sebagai *gini coefficient* atau indeks gini.

Koefisien gini adalah suatu koefisien yang berkisar dari angka 0 hingga 1, yang menjelaskan kadar pemerataan pendapatan. Koefisien yang semakin mendekati 0 berarti distribusi pendapatan semakin merata, sebaliknya koefisien yang semakin mendekati 1 berarti distribusi pendapatan semakin

timbang. Angka rasio Gini dapat ditaksir secara visual langsung dari kurva Lorenz, yaitu perbandingan luas area yang terletak diantara kurva Lorenz dan diagonal terhadap luas area segitiga OBC. Semakin melengkung kurva Lorenz, akan semakin luas yang dibagi rasio Gini-nya akan semakin besar, menyiratkan distribusi pendapatan yang semakin timpang. Koefisien Gini juga dapat dihitung secara matematik dengan rumus :

$$G = 1 - \sum_1^n (X_{i+1} - X_i)(Y_i + Y_{i+1}) \dots \dots \dots (1.1)$$

Dimana :

G = Koefisien Gini

X_i = Proporsi Kumulatif Rumah Tangga dalam Kelas- i

Y_i = Proporsi Kumulatif pendapatan dalam Kelas- i

Todaro (1981) dalam Sya'dullah (1999) memberikan batasan, bahwa negara-negara yang ketimpangannya tinggi, maka koefisien Gini-nya terletak antara 0,5-0,7. Sedang negara-negara yang ketimpangannya relatif rendah (merata), koefisien Gini-nya terletak antara 0,2-0,35.¹²

3. Kriteria Bank Dunia

Bank Dunia yang bekerjasama dengan *Institute of Development Studies* menentukan kriteria tentang penggolongan distribusi pendapatan, apakah dalam keadaan ketimpangan yang parah, sedang, atau ringan. Kriteria tersebut menunjukkan bahwa:¹³

¹² Makmun Sya'dullah. 1999. *Dampak Pengalokasian DIP dan Inpres terhadap Distribusi Pendapatan*, dalam Jurnal Ekonomi dan Pembangunan. JEP VII (1). PEP – LIPI. Hal. 61.

¹³ Mudrajat Kuncoro. 2003. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*. UPP-APN-YKPN, Yogyakarta. Hal. 58.

- a) Jika 40 persen penduduk suatu negara berpendapatan terendah memperoleh sekitar kurang 12 persen jumlah pendapatan negara tersebut maka hal ini termasuk kedalam ketimpangan yang tinggi.
- b) Kelompok kedua adalah 40 persen dari jumlah penduduk yang berpendapatan terendah, tetapi hanya menerima antara 12-17 persen dari seluruh pendapatan negara. Golongan ini masih dapat dikatakan sebagai keadaan dengan ketimpangan yang sedang.
- c) Jika golongan penduduk yang 40 persen tersebut memperoleh lebih dari 17 persen dari total pendapatan negaranya, maka tingkat ketimpangannya termasuk rendah.

4. Indeks Williamson

Indeks Williamson ini diperkenalkan oleh Jeffry G Williamson (1965), penghitungan nilai ini didasarkan pada indeks variasi (CV) dan Williamson memodifikasi perhitungan ini dengan menimbanginya dengan proporsi penduduk wilayah.¹⁴

Berbeda halnya dengan indeks gini yang menghitung nilai distribusi pendapatan seluruh rumah tangga dalam suatu daerah atau negara, indeks Williamson ini dapat melihat besarnya ketimpangan distribusi pendapatan antar daerah dalam sebuah wilayah. Semakin besar angka indeks Williamson ini maka semakin besar pula tingkat ketimpangan yang terjadi. Indeks ini dapat dihitung dengan rumus:

¹⁴ Tulus T.H. Tambunan. *Op Cit.* Hal. 84-89

$$CV_w = \frac{\sqrt{\sum_i (Y_i - \bar{Y})^2 \cdot \frac{f_i}{n}}}{\bar{Y}} \dots\dots\dots(1.2)$$

Dimana :

CV_w = Indeks ketimpangan pendapatan wilayah

f_i = Jumlah penduduk di propinsi i

n = Jumlah penduduk nasional

Y_i = Pendapatan per kapita di propinsi i

\bar{Y} = Rata-rata pendapatan per kapita untuk seluruh propinsi

Batasan tingkat ketimpangan antar wilayah dengan menggunakan ukuran ini, yaitu:¹⁵

- a) Nilai indeks > 1 , terjadi ketimpangan yang maksimum
- b) Nilai indeks $0,7 - 1$, terjadi ketimpangan yang tinggi
- c) Nilai indeks $0,4 - 0,6$, terjadi ketimpangan yang sedang
- d) Nilai indeks $< 0,3$, terjadi ketimpangan yang rendah

5. Teori Kuznets

Kuznets (1969) dalam analisisnya mengenai pola sejarah pertumbuhan negara-negara maju, menyatakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan cenderung memburuk, sedangkan pada tahap selanjutnya cenderung membaik.

Argumen tradisional dalam analisisnya mengenai pembangunan ekonomi jarang sekali menyinggung hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan

¹⁵ Thomas Nugroho. 2004. *Disparitas Pembangunan Wilayah Pesisir Utara dan Selatan Jawa Barat (Studi Kasus Di Kabupaten Karawang Subang – Garut Ciamis)* [Tesis]. Sekolah Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor. Hal. 52.

distribusi pendapatan, namun sebagian besar teorinya menyatakan bahwa distribusi pendapatan yang sangat tidak merata diperlukan untuk menggalakkan pertumbuhan yang cepat.¹⁶ Apabila ketidakadilan merupakan sesuatu yang diperlukan dalam proses pertumbuhan maksimal dan apabila pertumbuhan jangka panjang diperlukan untuk meningkatkan taraf hidup penduduk melalui "tetesan" proses persaingan dan sistem ekonomi campuran, maka perhatian langsung mengenai pemberantasan kemiskinan merupakan suatu usaha besar tersendiri.

Dasar argumen ekonomi yang mengizinkan ketidakmerataan pendapatan adalah bahwa pendapatan perseorangan dan perusahaan yang tinggi merupakan kondisi yang diperlukan bagi perkembangan. Dalam model Harrod-Domar, yaitu andaikata golongan kaya menabung dan menginvestasikan sebagian keuntungannya, sementara golongan miskin membelanjakan semua pendapatannya berupa barang-narang konsumsi dan laju pertumbuhan GNP langsung berkaitan dengan proporsi pendapatan nasional yang ditabung, maka perekonomian akan ditandai oleh distribusi pendapatan yang sangat tidak merata.

2.1.4 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

a. Pendapatan Asli Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Pasal 4 bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut :

¹⁶ Walter Galenson and Harvey Leibenstein, "Instrument Criteria, Productivity and Economic Development", *Quarterly Journal of Economics*, Agustus 1955, pp 343-370.

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Dalam rangka melaksanakan wewenang sebagaimana yang di amanatkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka daerah harus melakukan maksimalisasi pendapatan asli daerah. Maksimalisasi PAD dalam pengertian bahwa keleluasaan yang dimiliki oleh daerah dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan PAD maupun untuk menggali sumber-sumber penerimaan yang baru.

Peningkatan PAD dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Intensifikasi, melalui upaya :
 - Pendataan dan peremajaan objek dan subjek pajak dan retribusi daerah.
 - Mempelajari kembali pajak daerah yang dipangkas guna mencari kemungkinan untuk dialihkan menjadi retribusi.
 - Mengintensifikasi penerimaan retribusi daerah yang ada.
 - Memperbaiki prasarana dan sarana pungutan daerah yang ada.
- b. Penggalan sumber-sumber penerimaan baru (ekstensifikasi). Penggalan sumber-sumber pendapatan daerah tersebut harus ditekankan agar tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Sebab, pada dasarnya tujuan

meningkatkan pendapatan daerah melalui upaya ekstensifikasi adalah untuk meningkatkan kegiatan ekonomi di masyarakat. Dengan demikian, upaya ekstensifikasi lebih diarahkan pada upaya untuk mempertahankan potensi daerah sehingga potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

- c. Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat ini merupakan unsur yang penting mengingat bahwa paradigma yang berkembang dalam masyarakat saat ini adalah bahwa pembayaran pajak dan retribusi sudah merupakan hak dari pada kewajiban masyarakat terhadap negara, untuk itu perlu dikaji kembali pengertian wujud layanan yang bagaimana yang dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat.

b. Dana Perimbangan

Adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari :

1. Bagian daerah (Dana Bagi Hasil) dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi dan Sumber Daya Alam (SDA).
2. Dana Alokasi Umum (DAU)
3. Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dana Bagi Hasil dibagi berdasarkan persentase tertentu bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pendapatan pemerintah pusat dari eksploitasi sumber daya alam, seperti minyak dan gas, pertambangan dan kehutanan dibagi dalam proporsi yang bervariasi antara pemerintah pusat, provinsi, kota dan kabupaten. Penerimaan negara yang dihasilkan terdiri atas :

1. Penerimaan Pajak
 - a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - b. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
 - c. PPh Orang Pribadi
2. Penerimaan Bukan Pajak (SDA)
 - a. Sektor Kehutanan
 - b. Sektor Pertambangan Umum
 - c. Sektor Minyak Bumi dan Gas Alam
 - d. Sektor Perikanan

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan *block grants* yang diberikan kepada semua kabupaten dan kota untuk tujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya, dan didistribusikan dengan formula berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak daripada daerah kaya. Dengan kata lain, tujuan penting alokasi DAU adalah dalam kerangka pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan public antar pemda di Indonesia. Secara defenisi, DAU dapat diartikan sebagai berikut (Sidik, 2003) :

1. Salah satu komponen dari Dana Perimbangan pada APBN, yang pengalokasiannya didasarkan atas konsep Kesenjangan Fiskal atau Celah Fiskal (*Fiscal Gap*), yaitu selisih antara Kebutuhan Fiskal dengan Kapasitas Fiskal.
2. Instrumen untuk mengatasi *horizontal imbalance*, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah di mana penggunaannya ditetapkan sepenuhnya oleh daerah.
3. *Equalization grant*, yaitu berfungsi untuk menetralisasi ketimpangan kemampuan keuangan dengan adanya PAD, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil SDA yang diperoleh daerah.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK ditujukan untuk daerah khusus yang terpilih untuk tujuan khusus. Karena itu, alokasi yang didistribusikan oleh pemerintah pusat sepenuhnya merupakan wewenang pusat untuk tujuan nasional khusus. Kebutuhan khusus dalam DAK meliputi :

1. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah terpencil yang tidak mempunyai akses yang memadai ke daerah lain;
2. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah yang menampung transmigrasi;
3. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik yang terletak di daerah pesisir/kepulauan dan tidak mempunyai prasarana dan sarana yang memadai;

4. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah guna mengatasi dampak kerusakan lingkungan.

Persyaratan untuk memperoleh DAK adalah sebagai berikut :

1. Daerah perlu membuktikan bahwa daerah kurang mampu membiayai seluruh pengeluaran usulan kegiatan tersebut dari PAD, Bagi Hasil Pajak dan SDA, DAU, Pinjaman Daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah.
2. Daerah menyediakan dana pendamping sekurang-kurangnya 10% dari kegiatan yang diajukan (dikecualikan untuk DAK dari Dana Reboisasi)
3. Kegiatan tersebut memenuhi kriteria teknis sektor/kegiatan ditetapkan oleh menteri /instansi terkait.

c. Pinjaman daerah

Di bawah undang-undang tersebut, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mencari pinjaman baik domestik maupun dari luar negeri, dan dari institusi keuangan public termasuk institusi keuangan multilateral dan agen pemberi bantuan dan pemerintah pusat seperti juga dari institusi keuangan swasta. Walaupun demikian, terdapat pembatasan tertentu yang dirancang dengan tujuan untuk menjamin manajemen keuangan yang berhati-hati pada pemerintah daerah. Utang jangka panjang terbatas untuk pembangunan infrastruktur yang dapat menghasilkan pendapatan, sedangkan utang jangka pendek hanya dapat digunakan untuk operasi keuangan untuk penyesuaian aliran kas musiman. Utang jangka pendek tidak boleh melebihi 75% pendapatan umum, rasio bunga dari utang jangka panjang tidak boleh lebih dari 2,5 kali, dan utang jangka pendek tidak

boleh melebihi 1/6 total anggaran belanja. Pinjaman internasional harus melalui pemerintah pusat. Ketentuan penting dalam peraturan pemerintah adalah kewenangan Menteri Keuangan untuk mengawasi pinjaman daerah untuk tujuan kebijakan ekonomi makro.

Isu lain berkenaan dengan pinjaman pemerintah daerah adalah (Simanjuntak, 2003) :

1. Sebagian besar pemberi pinjaman eksternal segan untuk mengadakan persetujuan pinjaman dengan pemerintah lokal; mereka lebih menyukai *onlending mechanism (two step loan)*.
2. Kerangka kerja tentang pengaturan dan sistem yang ada tidak terlalu mendukung pengembangan mekanisme pinjaman daerah.
3. Pemerintah daerah belum berpengalaman dalam melakukan *hedging* untuk mengendalikan resiko perubahan kurs luar negeri.
4. Pinjaman yang lalu lebih terakumulasi dan terkonsentrasi pada sektor air minum/PDAM.

Dalam konteks otonomi daerah, begitu juga dengan ketahanan fiskal, mekanisme pinjaman daerah harus dikembangkan. Hal ini dapat dilihat dari sisi permintaan dan sisi penawaran. Dilihat dari sisi permintaan, ada beberapa indikasi bahwa permintaan untuk pinjaman oleh pemerintah daerah memang ada. Pada kenyataannya, hal tersebut dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu ; pemerintah daerah yang mempunyai kemampuan finansial yang kuat, pemerintah yang mempunyai kemampuan finansial yang moderat, dan pemerintah daerah yang mempunyai kemampuan finansial yang lemah/rendah. Sedangkan dari sisi

penawaran, perlu dikembangkan kredit pemerintah daerah yang mengacu pada sistem yang berdasarkan pasar. Ada suatu pemahaman yang berkebang di antara pemerintah pusat dan daerah (dan juga pihak masyarakat/swasta) bahwa selayaknya pemerintah pusat tidak terlibat terlalu dalam. Tahap untuk mendirikan insitusi keuangan yang independent yang berkaitan dengan pemerintah daerah sudah seharusnya dikaji lebih mendalam. Usaha apa pun untuk mendirikan institusi kredit daerah atau Pendanaan Pengembangan Daerah harus mengacu pada beberapa faktor prasyarat. Faktor tersebut antara lain: gejala otentik ketidakseimbangan penawaran modal, permintaan efektif terhadap jasa institusi, dan lingkungan financial yang kondusif. Semua faktor ini harus dikaji lebih lanjut untuk mendapatkan perspektif yang lebih baik tentang pinjaman pemerintah daerah di Indonesia.

b. Lain-lain pendapatan yang sah

2.1.5 Produk Domestik Regional Bruto

Salah satu dasar yang digunakan untuk mengukur tingkat perekonomian suatu wilayah adalah dengan menggunakan besaran nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Nilai PDRB disajikan atas dasar harga berlaku (sesuai dengan pasar/transaksi pada tahun penghitungan) dan atas dasar harga konstan (harga pasar pada tahun tertentu).

Perubahan besaran PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun penghitungan masih memuat akibat terjadinya inflasi/deflasi sehingga tidak memperlihatkan pertumbuhan atau perubahan PDRB secara riil. Sebaliknya,

PDRB atas dasar harga konstan menggunakan harga pasar pada tahun tertentu, sehingga perubahan besaran PDRB sudah terlepas dari pengaruh inflasi/deflasi.

Besar kecilnya PDRB yang dapat dihasilkan oleh suatu wilayah/daerah dipengaruhi oleh besarnya sumberdaya alam yang telah dimanfaatkan dan macamnya, jumlah dan mutu sumberdaya manusia, kebijaksanaan pemerintah, letak geografis serta tersedianya sarana dan prasarana. Dalam menghitung pendapatan regional, BPS (1995) memasukkan seluruh nilai tambah yang dihasilkan oleh berbagai sektor/lapangan usaha yang melakukan usahanya disuatu wilayah atau daerah, tanpa memperhatikan pemilik atas faktor produksi. Dengan demikian, PDRB secara keseluruhan menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan/balas jasa kepada faktor-faktor produksi yang ikut berpartisipasi dalam proses produksi di daerah tersebut. Penghitungan PDRB dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu:

a. Metode Langsung

Dalam menghitung PDRB dengan metode langsung, penghitungan didasarkan sepenuhnya kepada data daerah yang terpisah dari data nasional, sehingga hasil penghitungannya mencakup seluruh produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh daerah tersebut. Dalam metode ini PDRB dapat diukur dengan 3 (tiga) pendekatan, yaitu :

1 Pendekatan produksi

PDRB merupakan jumlah barang dan jasa terakhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Unit-unit produksi dimaksud secara garis besar dipilah-pilah menjadi 11 (sebelas) sektor, yaitu: (1) pertanian; (2) pertambangan dan galian; (3) industri pengolahan; (4) listrik, gas dan air minum; (5) bangunan; (6) perdagangan; (7) pengangkutan dan komunikasi; (8) bank dan lembaga keuangan lainnya; (9) sewa rumah; (10) pemerintahan; (11) jasa-jasa.

2 Pendekatan pendapatan

PDRB adalah jumlah balas jasa yang diterima faktor-faktor produksi yang turut serta dalam proses produksi disuatu wilayah dalam jangka waktu setahun. Balas jasa produksi tersebut meliputi upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan. Semuanya dihitung sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam hal ini mencakup juga penyusutan dan pajak-pajak tak langsung neto. Jumlah komponen pendapatan persektor disebut *nilai tambah bruto sektoral*. Oleh sebab itu, PDRB menurut pendekatan pendapatan merupakan penjumlahan dari nilai tambah bruto seluruh sektor atau lapangan usaha.

3 Pendekatan pengeluaran

Menurut pendekatan ini PDRB adalah jumlah seluruh komponen permintaan akhir, meliputi (1) pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari keuntungan; (2) pembentukan modal

tetap domestik bruto dan perubahan stok; (3) pengeluaran konsumsi pemerintah; (4) ekspor neto (yaitu ekspor dikurangi impor), dalam jangka waktu satu tahun.

b. Metode Tidak Langsung/Alokasi

Dalam melakukan perhitungan PDRB melalui metode tidak langsung/alokasi penghitung dilakukan dengan cara menghitung nilai tambah suatu kelompok kegiatan ekonomi dengan mengalokasikan nilai tambah nasional kedalam masing-masing kegiatan ekonomi pada tingkat regional. Sebagai alokator digunakan indikator yang paling besar pengaruhnya atau erat kaitannya dengan produktivitas kegiatan ekonomi tersebut.

Penghitungan PDRB pada suatu wilayah/daerah dengan menggunakan metode langsung atau tidak langsung/alokasi sangat tergantung pada data yang tersedia. Pada dasarnya, pemakaian kedua metode tersebut akan saling menunjang satu sama lain, karena penghitungan dengan metode langsung akan mendorong peningkatan mutu atau kualitas data daerah, sedangkan penghitungan dengan metode tidak langsung merupakan koreksi dan pembanding bagi data daerah.

Dilihat dari penjelasan di atas, PDRB dari suatu wilayah lebih menunjukkan pada besaran produksi suatu daerah, bukan pendapatan yang sebenarnya diterima oleh penduduk di daerah yang bersangkutan. Walaupun demikian, PDRB merupakan data yang paling representatif dalam menunjukkan pendapatan dibandingkan dengan data-data lainnya.

2.1.6 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi jika jumlah produksi barang dan jasanya meningkat. Dalam dunia nyata, amat sulit untuk mencatat jumlah unit barang dan jasa yang dihasilkan selama periode tertentu. Kesulitan ini muncul bukan saja karena jenis barang dan jasa yang dihasilkan sangat beragam, tetapi satuan ukurannya pun berbeda. Karena itu angka yang digunakan untuk menaksir perubahan output adalah nilai moneternya (uang) yang tercermin dalam nilai Produk Domestik Bruto (PDB). Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, nilai PDB yang digunakan adalah PDB berdasarkan harga konstan. Sebab, dengan menggunakan harga konstan, pengaruh perubahan harga telah dihilangkan, sehingga sekalipun angka yang muncul adalah nilai uang dari total output barang dan jasa, perubahan nilai PDB sekaligus menunjukkan perubahan jumlah kuantitas barang dan jasa yang dihasilkan selama periode tertentu.

Adapun pertumbuhan ekonomi (dalam konteks daerah) maupun pendapatan per kapita dihitung dengan formulasi berikut ini (Kuncoro 2004) :

$$\text{Pertumbuhan ekonomi} = \frac{\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1}}{\text{PDRB}_{t-1}} \times 100\% \dots\dots\dots(1.3)$$

Untuk mengukur laju pertumbuhan rata-rata per tahun digunakan rumus sebagai berikut :

$$r = \left(\left(\sqrt[n]{\frac{T_n}{T_o}} - 1 \right) \right) \times 100 \dots\dots\dots(1.4)$$

r = laju pertumbuhan ekonomi rata-rata

n = jumlah tahun (dihitung mulai dengan sampai dengan)

T_n = data tahun sebelumnya

T_o = data tahun tertentu

Menurut Michael P Todaro (2004) terdapat tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa, antara lain :

- a. Akomodasi modal yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik dan modal atau sumber daya manusia.
- b. Pertumbuhan penduduk yang beberapa tahun selanjutnya akan memperbanyak akumulasi capital.
- c. Kemajuan teknologi.

2.2 Kerangka Pemikiran Teoritis

Keberhasilan ekonomi suatu negara biasanya diukur dari tingginya angka pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Namun demikian, terdapat satu ukuran yang lebih representatif dalam melihat keberhasilan ekonomi suatu negara ini, yaitu dilihat dari segi kesejahteraan masyarakatnya dan hal ini dapat dilihat melalui dimensi pemerataan (*equality*). Pembangunan yang semata-mata mengejar pertumbuhan diyakini akan menghasilkan berbagai kesenjangan dalam kesejahteraan golongan masyarakat (antara golongan kaya dan golongan miskin) maupun dalam bentuk kesenjangan antar daerah atau ketimpangan wilayah.

Maka dapat dipahami jika masalah ketimpangan atau kesenjangan antar daerah selalu menjadi salah satu isu utama dalam pembangunan daerah di Indonesia.

Pada awal pemerintahan Orde Baru, para pembuat kebijaksanaan dan perencana pembangunan masih sangat percaya bahwa proses pembangunan ekonomi yang terpusatkan hanya di Pulau Jawa saja, khususnya Jakarta dan sekitarnya, dan hanya di sektor-sektor tertentu, pada akhirnya akan menghasilkan apa yang disebut efek “tetesan kebawah”. Didasarkan pada kerangka pemikiran tersebut, pada awal periode Orde Baru strategi pembangunan ekonomi lebih berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Dimulai pada Repelita I, strategi pembangunan dan kebijakan ekonomi terpusatkan pada pembangunan industri-industri yang dapat menghasilkan devisa lewat ekspor dan substitusi impor. Industri-industri tersebut diantaranya: industri yang memproses bahan baku yang tersedia di dalam negeri, industri yang padat karya, industri yang mendukung pembangunan regional, dan juga industri dasar seperti pupuk, semen, kimia dasar, kertas dan tekstil.¹⁷

Dampak Repelita I dan repelita-repelita berikutnya terhadap perekonomian Indonesia cukup mengagumkan, terutama dilihat pada tingkat makro. Pada awal Repelita I (1969), PDB Indonesia tercatat 2,7 triliun pada harga berlaku atau 4,8 triliun pada harga konstan. Pada tahun 1990 menjadi 188,5 triliun rupiah pada harga berlaku atau 112,4 triliun rupiah pada harga konstan dan selama periode 1969-1990, laju pertumbuhan PDB pada harga konstan rata-rata pertahun di atas 7 %.

Pada tahun 1998 krisis yang melanda Asia ternyata Indonesia mengalami krisis yang paling parah. Krisis mata uang yang melanda Indonesia paling parah

¹⁷ Tulus T.H. Tambunan, *Op Cit*, Hal. 10.

sejak tiga sampai enam bulan semenjak awal krisis.¹⁸ Tercatat tingkat depresiasi rupiah yang dialami Indonesia paling parah (sekitar 300 persen) dibandingkan dengan negara-negara lain yang terkena krisis.

Ketidakmampuan Indonesia dalam menerima gejolak krisis tersebut, ditambah dengan kekecewaan yang dirasakan masyarakat atas ketidakadilan dalam proses pembangunan dan hasil-hasilnya, memunculkan semangat reformasi terutama dikalangan pemuda. Sekitar akhir bulan Mei 1998, gedung DPR-MPR diduduki oleh ribuan mahasiswa yang menuntut pengunduran diri Presiden Soeharto dan adanya tuntutan reformasi di segala bidang. Salah satu tuntutan reformasi tersebut yaitu tuntutan terhadap pemerintahan daerah yang lebih otonom.

Untuk menjaga integrasi nasional atas tuntutan masyarakat tersebut juga merespon tuntutan akan keadilan daerah setelah lengsernya Soeharto, maka pada saat pemerintahan Habibie dikeluarkanlah satu paket kebijakan tentang Otonomi Daerah. Kebijakan ini terangkum dalam satu paket undang-undang, yakni UU. No. 22/1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah. Pelaksanaan kedua Undang-undang tersebut secara resmi dimulai pada tanggal 1 Januari 2001. Dengan berlakunya UU. No. 22/1999 dan UU No. 25/1999 yang mengatur kebijakan pemerintahan daerah dan desentralisasi fiskal sebagai awal dimulainya suatu era baru

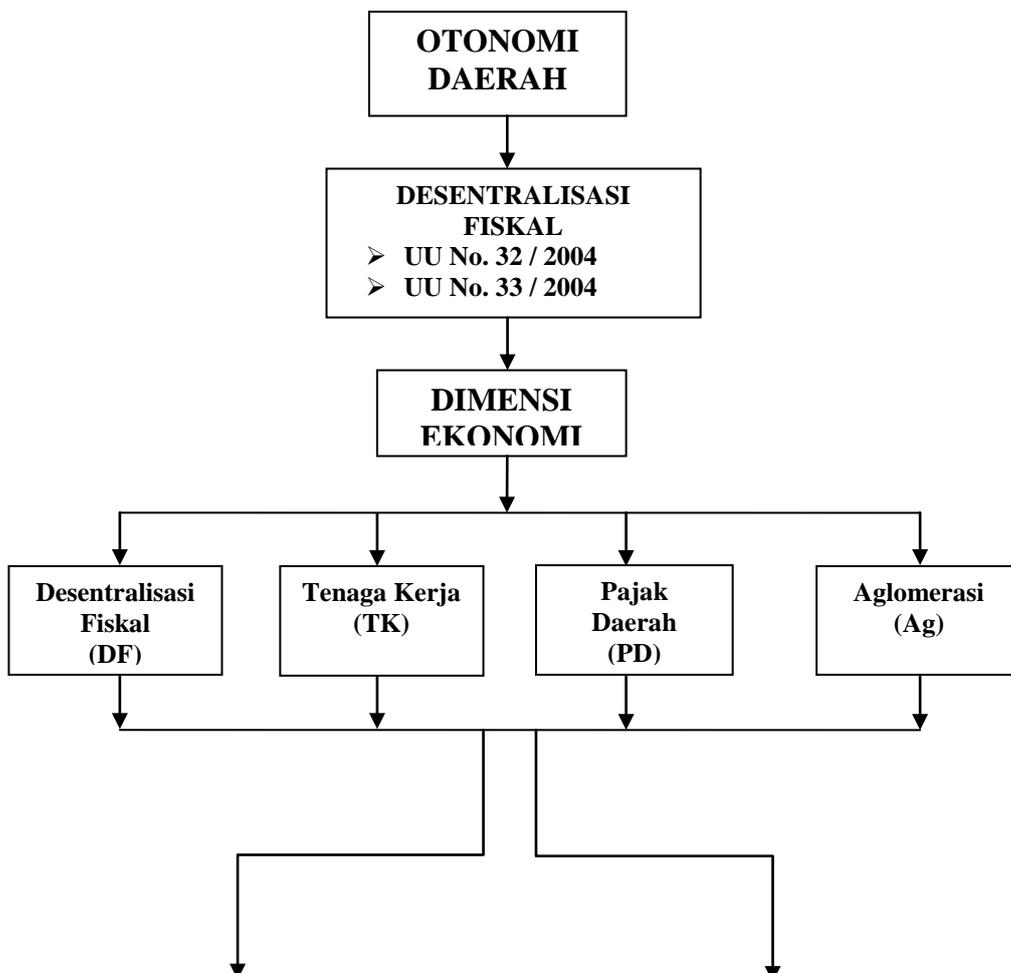
¹⁸ Krisis yang melanda Asia ini dimulai dengan pengakuan Spekulasi-Soros yang tak puas akibat diterimanya Myanmar menjadi anggota ASEAN, lantas ia menggoncang Thailand yang merembet ke Filipina, Malaysia, Indonesia, Singapura dan belakangan menohok Korea Selatan bahkan juga Jepang (Damanhuri, 1999: 21). Sekitar Mei 1997 bank sentral Thailand menyerahkan sepenuhnya nilai tukar Baht pada mekanisme pasar, akibatnya nilai Baht terdepresiasi sekitar 15 persen sampai 20 persen hingga mencapai nilai terendah, yakni 28,20 Baht per dolar AS.

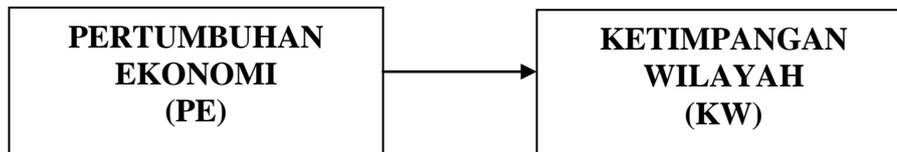
penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih otonom, membuka satu harapan baru untuk memecahkan masalah ketimpangan yang terjadi selama ini.

Kerangka Pemikiran Teoritis penelitian ini, disajikan sebagai berikut:

Gambar 2.2

BAGAN KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS





2.3 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara dari permasalahan yang menjadi objek penelitian dimana tingkat kebenarannya masih perlu diuji. Berdasarkan permasalahan diatas maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Diduga adanya pengaruh positif dari desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi.
2. Diduga adanya pengaruh positif dari pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan antar wilayah.
3. Diduga adanya pengaruh negatif derajat desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan antar wilayah.
4. Diduga adanya pengaruh negatif pajak daerah terhadap ketimpangan antar wilayah..
5. Diduga adanya pengaruh negatif tenaga kerja terhadap ketimpangan antar wilayah.

6. Diduga adanya pengaruh positif aglomerasi terhadap ketimpangan antar wilayah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional

3.1.1 Variabel Penelitian

Variabel adalah segala sesuatu yang dapat diberi berbagai macam nilai.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Variabel terikat (*dependent variable*) yaitu Pertumbuhan Ekonomi (PE), Perkembangan Ketimpangan Pendapatan Antar Wilayah dan Ketimpangan Wilayah (KW).
2. Variabel bebas (*independent variable*) antara lain: Desentralisasi fiskal (DF), Tenaga Kerja (TK), Pajak Daerah (PD), dan Aglomerasi (Ag).

3.1.2 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah defenisi yang didasarkan atas sifat-sifat hal yang didefinisikan yang dapat diamati (diobservasi). Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (1989) memberi batasan tentang defenisi operasional adalah : “definisi operasional merupakan unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel atau dengan kata lain defenisi operasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur suatu variabel”. Dalam penelitian ini definisi operasional dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut :

- ❖ Pertumbuhan Ekonomi (PE), berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi wilayah diukur melalui logaritma natural Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita kabupaten/kota, dengan tujuan untuk menangkap perubahan relatif (dibandingkan tahun sebelumnya) dari PDRB per kapita. PDRB yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDRB pendekatan produksi atas dasar harga konstan tahun 2000.
- ❖ Ketimpangan Wilayah (KW), digunakan proksi sesuai dengan yang dipakai dalam penelitian yang dilakukan oleh Jaime Bonet (2006) yang mendasarkan ukuran kesenjangan wilayah pada konsep PDRB per kapita relatif, dengan formula sebagai berikut :

$$KW_{i,t} = \left| \frac{PDRBPC_{i,t}}{PDRBPC_{prop.sumut,t}} - 1 \right| \dots\dots\dots(3.1)$$

Keterangan :

$KW_{i,t}$ = Ketimpangan Wilayah Kabupaten/Kota i , pada tahun t

$PDRBPC_{i,t}$ = PDRB per kapita Kabupaten/Kota i , pada tahun t

$PDRBPC_{prop.sumut,t}$ = PDRB per kapita Propinsi Sumatera Utara, pada tahun t

PDRB per kapita Propinsi Sumatera Utara diperoleh dari hasil bagi penjumlahan PDRB per kapita 19 kabupaten/kota pada Propinsi Sumatera Utara, dengan jumlah penduduk 19 kabupaten/kota pada propinsi tersebut. Rumus tersebut menyatakan bahwa kesetaraan sempurna terjadi pada saat PDRB per kapita kabupaten/kota sama dengan PDRB per kapita Propinsi Sumatera Utara.

❖ Desentralisasi Fiskal (DF)

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Gary M. Woller dan Kerk Phillips, pengukuran derajat desentralisasi fiskal dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan penerimaan, yaitu mengukur derajat desentralisasi fiskal dari share penerimaan daerah terhadap total penerimaan daerah, yang dirumuskan sebagai berikut :

$$DF_{i,t} = \frac{PAD_{i,t}}{TPD_{i,t}} \times 100\% \dots\dots\dots(3.2)$$

Keterangan :

$DF_{i,t}$: Derajat desentralisasi fiskal kabupaten/kota i , pada tahun t

$PAD_{i,t}$: Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota i , pada tahun t

$TPD_{i,t}$: Total Penerimaan Daerah Kabupaten/Kota i , pada tahun t

Semakin besar nilai DF, menunjukkan semakin tinggi derajat desentralisasi fiskal di wilayah tersebut, demikian pula sebaliknya.

- ❖ Pajak Daerah (PD) adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan usaha kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
- ❖ Tenaga kerja (TK) adalah penduduk yang berusia sepuluh tahun ke atas baik yang bekerja maupun yang mencari pekerjaan (BPS). Diukur dari jumlah tenaga kerja per tahun, per wilayah.
- ❖ Aglomerasi (Ag)

Mengikuti penelitian Bonet (2006), aglomerasi yang dimaksud adalah aglomerasi produksi yang diproksi dari *share* PDRB kabupaten/kota terhadap PDRB Propinsi Sumatera Utara. Ukuran ini bertujuan untuk mengetahui dampak pemusatan aktivitas ekonomi pada 19 kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Utara terhadap pertumbuhan ekonomi 19 kabupaten/kota tersebut.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan jenis data yang dipergunakan adalah “*pooling data*” yang dikumpulkan dari berbagai macam sumber yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi Sumatera Utara, buku

dan jurnal terkait, sedangkan jangka waktu data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tahun 1995-2008.

Beberapa sumber data tersebut antara lain :

- Data PDRB per kapita atas dasar harga konstan tahun 2000 pada kurun waktu tahun 2004-2008 bersumber dari kantor BPS Propinsi Sumatera Utara.
- Data Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada kurun waktu tahun 2004-2008 bersumber dari kantor BPS Propinsi Sumatera Utara.
- Data Total Penerimaan Daerah (TPD) pada kurun waktu tahun 2004-2008 bersumber dari kantor BPS Propinsi Sumatera Utara.
- Data Pajak Daerah (PD) pada kurun waktu tahun 1994-2008 bersumber dari kantor BPS Propinsi Sumatera Utara.
- Data Tenaga Kerja (TK) pada kurun waktu tahun 2004-2008 bersumber dari kantor BPS Propinsi Sumatera Utara.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini sepenuhnya diperoleh melalui studi pustaka sebagai pengumpulan datanya. Studi pustaka merupakan teknik analisa untuk mendapatkan informasi melalui catatan, literatur, dokumentasi dan lain-lain yang masih relevan dengan penelitian (M. Nazir, 2000).

3.4 Metode Analisis

Untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan akan digunakan model ekonometrika. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan kuantitatif digunakan untuk menganalisis informasi kuantitatif (data yang dapat diukur, diuji dan ditransformasikan dalam bentuk persamaan, tabel dan sebagainya) (Marzuki, 2005). Tahapan analisis kuantitatif terdiri dari estimasi model regresi dengan penggunaan data panel, regresi persamaan linear berganda dengan menggunakan metode OLS (*Ordinary Least Square*), uji asumsi klasik dan uji statistik.

3.4.1 Estimasi Model Regresi

Model yang menjadi dasar penelitian ini adalah mengikuti model penelitian yang pernah digunakan oleh Gary M. Woller dan Kerk Phillips (1998) dan Jaime Bonet (2006), yaitu :

$$\text{Model Pertumbuhan Ekonomi : } PE = f(DF, TK, PD, Ag) \dots\dots\dots(3.3)$$

$$\text{Model Ketimpangan Wilayah : } KW = f(PE, DF, TK, PD, Ag) \dots\dots\dots(3.4)$$

keterangan : PE = Pertumbuhan Ekonomi

KW = Ketimpangan Wilayah

DF= Desentralisasi Fiskal

TK= Tenaga kerja

PD= Pajak Daerah

Ag= Aglomerasi

Model dasar (2.3) dan (2.4) diturunkan menjadi model ekonometrika sebagai berikut :

$$PE_{it} = \beta_0 + \beta_1 DF_{it} + \beta_2 PD_{it} + \beta_3 TK_{it} + \beta_4 Ag_{it} + \mu_{it} \dots\dots\dots(3.5)$$

$$KW_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 \widehat{KW}_{it} + \alpha_2 DF_{it} + \alpha_3 PD_{it} + \alpha_4 TK_{it} + \alpha_5 Ag_{it} + \mu_{it} \dots(3.6)$$

Dimana i merupakan unit cross section dan t menunjukkan periode waktu. Dalam model ini terdiri dari variabel independen (bebas) dan variabel dependen (terikat). Pertumbuhan ekonomi (Gr) diukur melalui PDRB per kapita kabupaten/kota atas dasar harga konstan. Sementara ketimpangan wilayah (IQ) diukur sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Jaime Bonet(2006).

3.4.2 Uji Penyimpangan Asumsi Klasik

Metode *Ordinary Least Squares* (OLS) merupakan model yang berusaha untuk meminimalkan penyimpangan hasil perhitungan (regresi) terhadap kondisi aktual. Dibandingkan dengan metode lain, *Ordinary Least Squares* merupakan metode sederhana yang dapat digunakan untuk melakukan regresi linear terhadap sebuah model. Sebagai estimator, *Ordinary Least Squares* merupakan metode regresi dengan keunggulan sebagai estimator linear terbaik yang tidak bias. BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*), sehingga hasil perhitungan *Ordinary Least Squares* dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan. Namun untuk menjadi sebuah estimator yang baik dan tidak bias, terdapat beberapa uji asumsi klasik yang harus dipenuhi.

Gujarati (1993) menyebutkan bahwa kesepuluh asumsi yang harus dipenuhi. *Pertama*, model persamaan berupa linear. *Kedua*, nilai variabel

independen tetap meskipun dalam pengambilan sampel yang berulang. *Ketiga* nilai rata-rata penyimpangan sama dengan nol. *Keempat, homoscedasticity*. *Kelima* tidak ada autokorelasi antara variabel. *Keenam*, nilai *covariance* sama dengan nol. *Ketujuh*, jumlah observasi harus lebih besar daripada jumlah parameter yang diestimasi. *Kedelapan*, nilai variabel independen yang bervariasi. *Kesembilan*, model regresi harus memiliki bentuk yang jelas. *Kespuluh* adalah tidak adanya *multicolinearity* antar variabel independen. Terpenuhinya kesepuluh asumsi di atas menjadikan hasil regresi memiliki derajat kepercayaan yang tinggi.

3.4.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau *residual* memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar, maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan uji grafik dan uji statistik.

Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Namun demikian kalau hanya dengan melihat histogram, hal ini dapat menyesatkan khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dan distribusi normal. Distribusi

normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan *ploting* data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.

Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusan:

- a. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya, hal ini menunjukkan pola distribusi normal, maka model memenuhi asumsi distribusi normalitas.
- b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas (Imam Gozali, 2005).

Dalam penelitian ini menggunakan *Jarque-Bera test (J-B test)* untuk melihat apakah data terdistribusi normal atau tidak. Uji ini menggunakan hasil residual dan *chi-square probability distribution*, hipotesis yang akan diuji adalah :

H_0 : Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal

H_a : Sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal

Kriteria pengujian adalah:

1. Bila nilai JB hitung $>$ nilai X^2 tabel, maka H_0 yang menyatakan residual, u_t adalah berdistribusi normal ditolak.

2. Bila nilai JB hitung $<$ nilai X^2 tabel, maka H_0 yang menyatakan residual, u_t adalah berdistribusi normal diterima.

3.4.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independent variable). Uji multikolinieritas terjadi hanya pada regresi ganda. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi tinggi diantara variabel bebas. Bila terjadi hubungan linear yang sempurna di antara beberapa atau semua variabel bebas dari suatu model regresi maka dikatakan terdapat masalah multikolinieritas dalam model tersebut. Masalah multikolinieritas mengakibatkan adanya kesulitan untuk dapat melihat pengaruh variabel penjelas terhadap variabel yang dijelaskan.

Untuk mendeteksi ada tidaknya gejala multikolinieritas dapat dilakukan dengan menggunakan korelasi parsial (*examination of partial correlation*). Metode ini dimunculkan oleh Farrar dan Glauber, metodenya adalah dengan melihat nilai R^2 dari model utama yang diestimasi dan nilai R^2 dari regresi antar variabel bebasnya. Bila R^2 model utama lebih tinggi dibandingkan R^2 dari regresi antar variabel-variabel bebasnya, dikatakan tidak terdapat masalah multikolinearitas.

3.4.2.3 Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah hubungan antara residual satu observasi dengan residual observasi lainnya. Autokorelasi lebih mudah timbul pada data yang bersifat runtut waktu, karena berdasarkan sifatnya, data masa sekarang dipengaruhi oleh data pada masa-masa sebelumnya. Meskipun demikian, tetap dimungkinkan autokorelasi dijumpai pada data yang bersifat antarobjek (*cross section*).

Dalam uji Durbin Watson (D-W test) autokorelasi dapat berbentuk autokorelasi positif dan autokorelasi negatif. Hipotesisnya adalah :

H_0 : tidak ada autokorelasi ($r = 0$)

H_1 : ada autokorelasi ($r \neq 0$)

TABEL 3.1
PENGAMBILAN KEPUTUSAN ADA TIDAKNYA AUTOKORELASI

Hipotesis nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dl$
Tidak ada autokorelasi positif	No decision	$dl \leq d \leq du$
Tidak ada autokorelasi negatif	Tolak	$4-dl < d < 4$
Tidak ada autokorelasi negatif	No decision	$4-du \leq d \leq 4-dl$
Tidak ada autokorelasi positif maupun negatif	Tidak ditolak	$du < d < 4-du$

3.4.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Salah satu asumsi pokok dalam model regresi linier klasik adalah bahwa varian setiap *disturbance term* yang dibatasi oleh nilai tertentu mengenai variabel-variabel bebas adalah berbentuk suatu nilai konstan yang sama dengan σ^2 . Inilah

yang disebut asumsi *homocedasticity* atau varian yang sama. Untuk mendeteksi ada tidaknya heterokedastisitas dapat menggunakan grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) dengan residualnya. Ada atau tidaknya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara variabel dependen dan residualnya dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual ($Y_{\text{prediksi}} - Y_{\text{sesungguhnya}}$).

3.4.3 Uji Statistik Analisis Regresi

3.4.3.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

R^2 bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel tak bebas, dimana $0 < R^2 < 1$ sehingga kesimpulan yang diambil adalah:

- Nilai R^2 yang kecil atau mendekati nol, berarti kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variabel-variabel tak bebas sangat terbatas.
- Nilai R^2 mendekati satu, berarti variabel-variabel bebas memberikan hampir semua informasi untuk memprediksi variasi variabel tak bebas.

Koefisien determinasi merupakan salah satu kriteria memilih model yang baik, namun koefisien determinasi memiliki kelemahan, yaitu bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan dalam model. Setiap tambahan satu variabel independen maka R^2 pasti akan meningkat tidak peduli apakah variabel

tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen atau tidak. Maka dianjurkan untuk menggunakan *adjusted R²* pada saat mengevaluasi model regresi yang terbaik. Nilai *adjusted R²* dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model (Imam Gozali, 2005).

3.4.3.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji f)

Uji F bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel tak bebas. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_k = 0 \dots\dots\dots(3.7)$$

$$H_1 : \text{tidak semua koefisien secara simultan} > 0 \dots\dots\dots(3.8)$$

Dengan demikian keputusan yang diambil adalah :

- Terima H_0 jika F statistik < nilai F tabel, artinya suatu variabel bebas bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel tak bebas.
- Terima H_1 jika nilai F statistik > nilai F tabel, artinya nilai suatu variabel bebas merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel tak bebas.

3.4.3.3 Pengujian Secara Individual (Uji t)

Uji t adalah yang biasanya digunakan untuk menguji hipotesis tentang koefisien-koefisien slope regresi secara individual. Uji t juga tepat digunakan apabila nilai-nilai residunya terdistribusi secara normal dan apabila varian dari distribusi itu harus diestimasi. Uji t juga bertujuan untuk mengetahui seberapa

jauh pengaruh satu variabel bebas secara individual dalam menjelaskan variasi variabel tak bebas.

Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut :

$H_0 : \beta_i = 0, \beta_i > 0$ adalah hubungan positif variabel dependen dengan variabel independen.

$H_0 : \beta_i = 0, \beta_i < 0$ adalah hubungan negatif antara variabel dependen dengan variabel independen.

Kriteria Pengujian :

H_0 diterima apabila t hitung $<$ t tabel, artinya variabel independen secara individual tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan (negatif).

H_0 ditolak apabila t hitung $>$ t tabel, artinya variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen secara signifikan (positif).